

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS FATWA HARAM BERMAIN *PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND'S (PUBG MOBILE)* DI ACEH
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

RAMDAN NAUE

NIM: 271414100

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

PEMBIMBING I

PEMBIMBING II



LISNAWATY W. BADU, SH., MH
Nip. 196905292005012001



DOLOT ALHASNI BAKUNG, SH., MH
Nip. 198508272009121005

Mengetahui

KETUA JURUSAN ILMU HUKUM



NOVENDRI M. NGGILU, SH., M.H
Nip: 198911272014041001

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS FATWA HARAM BERMAIN
PLAYER UNKNOWN'S BATTLE GROUND'S (PUBG MOBILE) DI ACEH
DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA**

Oleh:

RAMDAN NAUE

NIM 271414100

Telah diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji

Hari/Tanggal: JUMAT, 05 FEBRUARI 2021

Pukul: 14:00-16:00 WITA

Komisi Penguji:

1. **Mutia Cherawaty Thalib, SH., M.Hum**
NIP. 196907041998022001

(.....)

2. **Julius T. Mandjo, SH., MH**
NIP. 198907022019031015

(.....)

3. **Lisnawaty W. Badu, SH., MH**
NIP. 196905292005012001

(.....)

4. **Dolot Alhasni Bakung, SH., MH**
NIP. 198508272009121005

(.....)

Gorontalo, 05 Februari 2021

Mengetahui:

DEKAN FAKULTAS HUKUM



Prof. DR. Fenty U. Putuhulawa, SH., M.Hum
NIP: 196804091993032001

ABSTRAK

Ramdan Naue, 271414100. Analisis Yuridis Fatwa Haram Bermain *Player Unknown's Battle Grounds (PUBG Mobile)* di Aceh Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. **Ibu Lisnawaty W. Badu, SH., MH** Selaku Pembimbing 1 dan **Bapak Dolot Alhasni Bakung, SH., MH** Selaku Pembimbing II fakultas hukum Universitas Negeri Gorontalo. Penulisan Skripsi 2021.

Skripsi ini adalah hasil penelitian normatif dengan tujuan untuk menjawab permasalahan tentang fatwa haram bermain *Player Unknown's Battle Grounds* oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dengan menganggap *game* elektronik *PUBG Mobile* mengandung unsur-unsur kekerasan dan mengganggu psikologis untuk warga yang bermain *game* elektronik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum *normatif*, yaitu dengan mengkaji bahan-bahan Pustaka (studi kepustakaan). Karena itu, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang mencakup bahan hukum *primer*, *sekunder*, dan *tersier*.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh dalam mengeluarkan fatwa tidak mempertimbangkan hak-hak dan kewajiban dasar dari setiap warga negara lebih khususnya masyarakat Aceh terkait dengan pengembangan diri melalui cabang olahraga elektronik yaitu *PUBG Mobile* yang jelas sudah dimasukkan dalam kategori olahraga prestasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional. dan sudah membawa nama baik Indonesia dikejuaraan dunia. Sehingga sisi positif dari olahraga elektronik sudah dibuktikan. Maka dari itu dalam menetapkan fatwa perlu memperhatikan HAM dari setiap warga negara tanpa pengecualian. Kita ketahui bersama secara kelembagaan MPU Aceh dibentuk oleh amanat Undang-Undang. Maka dari itu peran MPU Aceh dalam menetapkan produk dalam hal ini fatwa, tidak bisa bertentangan dengan Undang-Undang dan Konstitusi.

Berdasarkan kesimpulan di atas, Pemerintah Indonesia harus membuat regulasi berupa Undang-Undang yang secara khusus dapat mengatur cabang olahraga elektronik dengan secara terperinci. Agar tidak akan menimbulkan masalah yang akan meresahkan masyarakat.

Kata Kunci: *Fatwa, Haram, PUBG Mobile, MPU Aceh, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

Ramdan Naue, 271414100. Juridical Analysis of the Haram (Forbidden) Fatwa of Playing PlayerUnknown's Battle Grounds (PUBG) Mobile in Aceh Reviewed from Human Rights Perspective. The Principal Supervisor **Lisnawaty W. Badu, S.H., M.H.**, and the Co-supervisor is **Dolot Alhasni Bakung, S.H., M.H.** Faculty of Law, State University of Gorontalo. Undergraduate Thesis, 2021.

This undergraduate thesis is the result of normative research which aims to answer the problem regarding the Haram Fatwa of playing the Player Unknown's Battle Grounds by the Ulama Consultative Assembly (MPU) of Aceh by assuming that the PUBG Mobile electronic game contains elements of violence and psychologically disturbs for the people who play it. This is normative legal research by using literature study. Therefore, the data used in this research is secondary data which includes primary, secondary, and tertiary legal materials.

Based on the finding, it is known that the Ulama Consultative Assembly (MPU) of Aceh in issuing a Fatwa does not consider the basic rights and obligations of every citizen, especially the people in Aceh related to self-development through the electronic sports branch – PUBG Mobile, even though this game has clearly been included in the category of achievement sports in accordance with Law Number 3 of 2005 concerning the National Sports System. The athletes have also succeeded in bringing Indonesia's prestige to the world championships so that the positive side of this electronic sport has been proven. Therefore, in establishing fatwas, it is necessary to pay attention to the human rights of every citizen without exception. We all know that the MPU of Aceh is institutionally formed by the mandate of the law, therefore the role of the MPU of Aceh in establish products, in this case the fatwa, cannot contradict the Law and the Constitution.

Regarding the conclusion above, the Government of Indonesia must make a regulation in the form of a law that can specifically regulate electronic sports in detail so as not to cause problems that unsettles the public.

Keywords: *Fatwa, Haran, PUBG Mobile, MPU of Aceh, Human Rights*

